

ABSTRAK

Interaksi kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal penting untuk ditinjau dalam mencapai kestabilan tingkat harga. Begitu pula mengenai koordinasi atau bauran kedua otoritas yang berbeda tersebut (McCallum, 1984). Leeper dan Leith (2016) menyatakan bahwa sering kali para ekonom mengesampingkan sisi fiskal dalam kaitannya dengan penyebab inflasi dan lebih menekankan pada sisi moneter. *Fiscal Theory of Price Level* (FTPL) menyatakan bahwa sebenarnya inflasi merupakan *Joint-phenomenon* dari sisi fiskal dan sisi moneter.

Bauran kebijakan yang dilakukan berdasarkan skenario yang telah dibuat (Skenario 1 dan 2) menggambarkan bahwa inflasi terjadi atas bauran kebijakan fiskal dan moneter baik saat kebijakan fiskal bersifat prosiklikal (ekspansi) dan kontrasiklikal (resesi) serta kebijakan moneter yang bersifat kontrasiklikal saat ekspansi dan resesi akan menghasilkan eskalasi harga yang lebih tinggi. Secara teknis, penelitian ini mengandung dua tahapan pemeriksaan yang disesuaikan dengan rumusan dan tujuan penelitian, yaitu: 1) pemeriksaan interaksi kebijakan fiskal dan moneter terhadap tingkat inflasi dan 2) pemeriksaan identifikasi sifat/rezim kebijakan fiskal dan moneter. Penelitian ini menggunakan Struktural VAR untuk memeriksa interaksi kedua kebijakan dan *Markov Switching Regime* untuk mengidentifikasi rezim kebijakan.

Penelitian ini menemukan bahwa terjadi disharmoni interaksi kebijakan fiskal dan moneter dalam menstabilkan tingkat harga, dimana kebijakan moneter yang dilakukan justru menyebabkan tingkat inflasi yang lebih tinggi pada ASEAN-5. Berdasarkan pemeriksaan tahap dua didapati bahwa saat perekonomian berada pada kondisi ekspansi maka rezim kebijakan yang terjadi adalah moneter aktif dan fiskal pasif (MA/FP). Sementara saat berada pada kondisi resesi rezim kebijakan yang terjadi adalah moneter pasif dan fiskal aktif (MP/FA). Hal ini menunjukkan bahwa dominasi fiskal terjadi saat perekonomian berada pada kondisi resesi.

Kata kunci: interaksi kebijakan fiskal dan moneter; sifat/rezim kebijakan; dominasi kebijakan.